

## **FUNGSI TARIF PAJAK PROGRESIF ATAS KENDARAAN BERMOTOR**

**PAWESTRI, WIDHAYANI DIAN**

**Pembimbing : Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H.**

**TAXATION-LAW AND LEGISLATION**

**KKB KK-2 THB 13 / 11 Paw f**

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

### **ABSTRAK**

Tesis ini berjudul “Fungsi Tarif Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan Strata (S-2) dalam mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penulisan tesis adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, surat kabar, majalah, karya ilmiah, laporan penelitian serta artikel internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil yang diperoleh dalam penulisan tesis ini adalah mengenai fungsi tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor yang ditelaah melalui pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis dan pendekatan ekonomi. Terkait dengan fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter*, kebijakan pemerintah menetapkan tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor merupakan alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan (*motor vehicle tax*) dan pengembangan modal serta membangun infrastruktur, sarana dan prasarana umum. Selain itu, terkait dengan fungsi pajak sebagai fungsi *regulerend*, fungsi kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Sedangkan ratio legis adanya kebijakan pengecualian tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor untuk badan adalah untuk menarik investor, serta untuk menarik dan membangkitkan tingkat perekonomian di daerah. Pemberlakuan pengecualian kebijakan tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor untuk badan juga akan lebih memberi manfaat positif bagi negara. Kebijakan tersebut dapat meminimalisasi adanya peluang Wajib Pajak badan untuk melakukan kriminalitas pajak berupa pengecilan pajak atau bahkan menghilangkan biaya pajak.

**Keyword : Pajak Progresif**

## ABSTRACT

This thesis entitled "Function of the Progressive Tax Rates on Motor Vehicles". Writing this thesis aims to meet one of the requirements in completing the study on the education level of Strata (S-2) in achieving the title of Master of Law at the Law Faculty of Airlangga University. In the writing of this thesis, the author uses the methods of legal research by using a normative approach to legislation (Statute approach) and conceptual approach. Legal material in this thesis is to use primary legal materials including the form of legislation, official records or treatise in the making of legislation, jurisprudence, as well as secondary legal materials obtained from legal text books, law dictionaries, law journals, comments of the jurisprudence, newspapers, magazines, scientific papers, research reports and articles on the internet which is relating to the legal issues. The results obtained in this thesis are about the function of a progressive tax rate on motor vehicles which are related with a philosophical approach, sociological and economic approaches. Associated with the tax function as a function of budgetary, policy the government sets the progressive tax rate on motor vehicles is for collecting and put more money into state coffers. Motor Vehicle Tax proceeds allocated for the construction and / or road maintenance and capital development and build infrastructure, public facilities and infrastructure. In addition, related with the tax functions as regulerend function, the function of a progressive policy of motor vehicle tax rate is to reduce the level of congestion in urban areas. Ratio legis of the existence of a policy exception progressive tax rates on motor vehicles for the institution is to attract investors, as well as to attract and raise the level of regional economy. Imposition a policy exception progressive tax rates on motor vehicles for the institution will also provide more positive benefits for the country. The policy can minimize the chances of Taxpayer entity to conduct criminal of tax, such as tax reduction or even eliminate the cost of taxes.